BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis tentang Negara dan Warga Negara

2.1.1 Kewajiban Negara terhadap Warga Negara (*Staat Obligation*)

Negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah ataupun daerah ataupun wilayah tertentu yang di dalamnya meliputi rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Pemerintah dalam hal ini memiliki kekuasaan serta wewenang untuk dapat mengatur penyelenggaraan suatu pemerintahan dan mengatur rakyatnya. Rakyat dalam hal ini harus mnegikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Tujuan negara untuk mengatur warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah supaya tercapainya kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia. Negara pula memiliki peran untuk menjaga dan mengatur ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan meratanya kesejahteraan tersebut di seluruh Indonesia, membentuk lapisan pertahanan dan keamanan negara serta negara dapat menegakan keadilan terhadap seluruh rakyatnya.⁴² Pemerintah dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia.

Setiap negara wajib melindungi dan menegakan hak asasi manusia Pengaturan HAM di dalam konstitusi menunjukkan bahwa HAM sudah menjadi materi muatan

⁴² Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", Vol. 2 No. 1, Jurnal Sospol, 2016, hal. 107.

konstitusi, sehingga mengikat semua pihak terkait terutama penyelenggara negara dan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara dan pemerintahan tersebut, tetapi juga semua orang dan warga negara. Namun demikian, di dalam UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan HAM berada pada pemerintah⁴³ Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat DUHAM.

Dalam hukum Hak Asasi Manusia, negara terutama pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Sebagai contoh, negara tidak melakukan intervensi terhadap hak pilih warga saat pemilu. Kewajiban ini harus diterapkan pada semua hak, baik hak hidup, integritas personel, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan dan pendidikan.⁴⁴ Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM.

⁴³ Affandi, Hernadi, Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak atas Atas Pendidikan Dalam UUD 1945, Jurnal hukum Positum, h. 223.

⁴⁴ Nowak, M. (2005), U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers,hal. XX-XXI.

Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak yang disebut.⁴⁵

Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.⁴⁶ Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan : “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Sangat jelas dari struktur undang-undang bahwa adalah tugas pemerintah untuk menegakkan, menghormati, menjunjung tinggi, dan memajukan hak asasi manusia. bahwa negara memikul tanggung jawab utama untuk pemajuan dan pembelaan hak asasi manusia di mana pun. Karena pertimbangan budaya, ekonomi, atau politik, tanggung jawab ini tidak dapat dikurangi.

⁴⁵ Lihat, Nowak, M. (2003), *Introduction to Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, hal. 48-51. Lihat juga beberapa Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 12 tentang Hak atas Kelayakan Pangan, paragraf 15.

⁴⁶ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 23.

Kewajiban negara yang paling mendasar adalah kewajibannya untuk menghormati. Negara berkewajiban untuk menghormati sumber daya individu dalam hal hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sementara itu, sejauh mana negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam sistem hukumnya merupakan aspek terpenting dari kewajiban untuk melindungi. Kewajiban untuk memberikan berbagai kemudahan atau pemberian secara langsung merupakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Penegasan kembali mengenai kewajiban pemerintah dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dinyatakan dalam Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang yang merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan di bidang HAM tersebut menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (*right-based approach*) dapat dilihat dalam tiga bentuk :⁴⁷

- a. Menghormati : merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- b. Melindungi : merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara diharap untuk bertindak aktif dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk

⁴⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Panduan Penelitian di Bidang HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009.

mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.

- c. Memenuhi : merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.

Dari ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Selain ketiga bentuk kewajiban utama tersebut dalam pelaksanaan hak asasi manusia, negara pun memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah (*to take step*), untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan/ memajukan (*to promote*) hak asasi manusia.

Warga negara merupakan penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya yang memiliki kewajiban serta hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Maka dari itu warga negara harus taat dan patuh terhadap segala peraturan dan norma yang ada di negara Indonesia. Warga negara Indonesia harus wajib dan patuh kepada peraturan yang berlaku karena peraturan yang dibuat untuk dapat mengatur kehidupan warga negara agar terciptanya keamanan serta

ketertiban dalam masyarakat, terciptanya masyarakat yang damai, aman, tentram, terhindar dari perselisihan serta tidak menimbulkan perpecahan. Tak hanya itu peraturan pula dibuat untuk melindungi hak-hak yang dimiliki warga negara. Selain itu, peraturan pula dibuat untuk mengatur hubungan antar manusia yang heterogen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁸

Warga negara juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara. Hak yang dimiliki warga negara menjadi tanggung jawab penuh oleh negara dalam hal ini pemerintah terkait dalam pemenuhannya. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Negara harus menjamin setiap warga Negara mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan pula harus merata dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia bukan hanya yang tinggal di daerah kota saja, tetapi menyentuh daerah yang tertinggal, terjauh dan terluar. Hal ini karena tongkat kepemimpinan bangsa akan terus dilanjutkan oleh generasi yang selanjutnya. Pendidikan dengan demikian merupakan hal yang harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia karena itu merupakan hak warga negara dan kewajiban negara dalam pemenuhannya.⁴⁹

Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap warga negara dari negara dalam hal ini adalah pemerintah. Menurut Prof. Dr. Notonegoro dalam Prof. Dr. Satjipto Raharjo⁵⁰ hak merupakan kuasa untuk dapat menerima ataupun melakukan sesuatu hal yang semestinya didapatkan atau diterima

⁴⁸ Wijayanti, S. N. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), hal. 186-199.

⁴⁹ Munawwaroh, A. (2019). Keteladanan Sebagai Metode Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, [SL], 7(2), hal. 141-156.

⁵⁰ Satjipto Raharjo dan Notonegoro, *Ilmu Hukum*, Cet. V, Bandung : Citra Aditya Bakti : 2000.

oleh pihak tertentu dan tidak dapat diambil oleh pihak lain maupun juga pada prinsipnya agar dapat dituntut secara paksa olehnya. Tak hanya itu hak merupakan kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum yang berlaku.⁵¹ Pengertian hak pada dasarnya berisikan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap suatu subjek hukum tertentu tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, serta kebebasan tersebut memiliki landasan hukum atau bisa disebut juga kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum. Setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menggunakan haknya, termasuk cara untuk dapat menggunakan kewenangan yang timbul dari haknya tersebut sepanjang yang dilakukannya tidak melanggar hak orang lain, aturan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum atau kesusilaan.⁵²

Hak yang dimiliki warga negara Indonesia tercantum dalam Undang Undang Dasar yang diantaranya diatur dalam pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) mengenai setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang lagi bagi kemanusiaan. Selanjutnya, dalam pasal 28 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) mengenai setiap warga negara berhak mendapat perlindungan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat 2 bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya. Dalam pasal 30 setiap warga negara berhak atas pertahanan dan keamanan hidup. Pada pasal 31 setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan yang layak. Selanjutnya, pasal 32 setiap warga negara berhak atas

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta : 2010.

⁵² Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung : Alumni : 2009.

kebudayaan nasional dan pengembangan nilai kebudayaan nasional sebagai kekayaan nasional. Selanjutnya pasal 33 setiap warga negara berhak atas demokrasi ekonomi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Selanjutnya, pasal 34 setiap warga negara memiliki hak jaminan sosial oleh negara. berhak untuk dibebaskan oleh pemerintah Indonesia jika menjadi tawanan atau sandera, berhak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan suara dalam pemilihan umum, dan berhak mendapat akses teknologi yang sama, misalnya pendistribusian jaringan internet dan listrik.

2.2 Tinjauan Teoritis tentang Hak-Hak Warga Negara

2.2.1 Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵³ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang pasti dimiliki setiap orang, dimana batas dari HAM itu sendiri adalah HAM yang dimiliki oleh orang lain. HAM wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, hukum, pemerintah dan negara, yang dalam pengupayaan perlindungannya dibentuk lah suatu perundang-undangan untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Dalam hal perlindungan HAM ini, perlu di tegakkan hukum setegas-tegasnya demi tercapainya sebuah keadilan yang hakiki dan substantif, dengan pertimbangan kepentingan perlindungan hak asasi setiap warga

⁵³ UU HAM No. 39 tahun 1999 pasal 1.

negara, dan kebijakan-kebijakan tertentu yang dibuat oleh hakim dalam mengadili seorang pelanggar hak asasi manusia.

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.⁵⁴ HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu : *“Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being”* (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada

⁵⁴ A.Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, CV. Yani's, Jakarta, 2006. Hal. 33-34.

juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.⁵⁵

Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sanksi yang tegas. Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Asasi ada Kewajiban Asasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak.

HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*The Four Freedoms*), yaitu :

- a. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*);
- b. kebebasan beragama (*Freedom of Religion*);
- c. kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*);
- d. kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*).

⁵⁵ *Ibid., hal. 21.*

Dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Berbagai hak asasi diberbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut :

2. Hak asasi politik (*political right*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya.
3. Hak asasi ekonomi (*property right*), hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
4. Hak asasi hukum (*right of legal equality*) , yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*prosedural right*). Misalnya peraturan dalam, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture right*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
6. Hak atas pribadi (*personal right*), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya. Tindakan diskriminatif tersebut diatas

merupakan pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal (dilakukan aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horisontal (antar warga negara sendiri); dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat (*gross violation of human right*)).

Secara konseptual dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud “Pelanggaran HAM” adalah Setiap perbuatan orang/kelompok baik disengaja/tidak disengaja/kelalaian secara melawan hukum mengurangi/menghalangi/ membatasi HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh UU dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁵⁶

2.2.2 Hak Memilih (*Right to Vote*)

Hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) adalah merupakan hak konstitusional warga negara. Kedudukannya jelas diatur dalam konstitusi dan telah diakui hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pelaksanaan hak memilih dan dipilih diatur dalam Undang-Undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hak pilih dibagi menjadi dua yaitu hak pilih pasif (hak dipilih) dan hak pilih aktif (hak memilih). Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menduduki posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, yang

⁵⁶ Muhtaj Majda El. Dimensi Dimensi HAM.

masing-masing hak wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis.⁵⁷

Oleh sebab itu, setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilihan harus terbebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak lain, intimidasi dan diskriminasi serta segala bentuk tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilu. Maka hak memilih bagi warga negara perlu mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah. Perlindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi langsung. Hal ini juga sekaligus sebagai pembuktian bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 benar-benar dapat merealisasikan hak pilihnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora bahwa sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan sekalipun harus diakui bahwa teramat sulit untuk memberikan keleluasaan kepada rakyat dalam menjalankan kekuasaan tertinggi itu.⁵⁸

Terdapat beberapa ketentuan di dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan konstitusional guna menjamin hak politik, khususnya hak warga negara untuk memilih (*right to vote*). Sejumlah ketentuan dimaksud di antaranya, Pasal 27

⁵⁷ Khairul Fahmi. 2017. Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 4. Hal. 758.

⁵⁸ Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, Hukum Tata Negara Indonesia, Jurnal Medan UD. Sabar, 2011, hal. 137-138.

ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian terdapat pula Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi bahwa : “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Beberapa ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak pilihnya di setiap pelaksanaan demokrasi langsung”.

Hak memilih adalah suatu bentuk pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Lebih khususnya Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh siapapun untuk merusak, menghapus bahkan mengurangi hak pilih dan memilih Warga Negara Indonesia kecuali ada beberapa hal

yang menyebabkan hak pilih dan memilih seseorang dihapuskan, dikurangi atau dibatasi karena ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Adapun ketentuan yang lain yang mengatur adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara untuk memiliki kebebasan ikut serta dalam menentukan wakil-wakil mereka baik dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif yang dilakukan melalui Pemilihan Umum.⁵⁹ Keberadaan hak memilih warga negara bukan hanya diakui secara nasional, melainkan juga secara internasional telah mendapat payung hukum yang memadai. Dengan demikian, maka menjadi sangat patut dan beralasan untuk mempersoalkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 karena dapat menyebabkan seorang warga negara berpotensi kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam daftar pemilih. Ketentuan ini jelas sangat tidak mencerminkan keadilan dan bertentangan dengan jiwa serta semangat yang terkandung dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, maka menjadi sangat beralasan bagi pihak pemohon dalam kasus permohonan pengujian Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa ketentuan pasal dimaksud telah membatasi dan bahkan melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*). Kalau hak asasi manusia yang sudah ditegaskan dalam konstitusi seperti hak untuk memilih sudah dibatasi dengan perangkat peraturan perundang-undangan.

⁵⁹ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. 2019. Memilih dan Dipilih, Hak politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum. Jurnal HAM. Vol. 10. Nomor. 2. Hal. 162.

Dalam hal hak memilih dan dipilih sebagai hak politik, dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia⁶⁰ diuraikan secara tegas sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan Negerinya.
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Ketentuan dalam Pasal 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia dimaknai bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan hal ini dilakukan melalui Pemilihan Umum yang demokratis berlangsung secara umum, langsung, bebas dan rahasia. Pemilu sebagai sarana penyaluran atas kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilu juga merupakan sarana terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat yang secara hakikat merupakan perwujudan serta pengakuan dari hak-hak politik rakyat dan juga sebagai pendelegasian dari hak-hak tersebut oleh rakyat kepada para wakil-wakilnya untuk

⁶⁰ Ian Brownlie, 1993, Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia, Universitas Indonesia (UI Press), hal. 31-32.

menjalankan roda pemerintahan.⁶¹ Para pemohon ketika itu tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilih, baik dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Sementara (DPS), walaupun para pemohon telah menunjukkan KTP dan KK aslinya, tetap tidak dapat memilih. Hal ini dikarenakan para petugas di lapangan berpegang teguh pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yang berbunyi: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” Atas dasar itu, maka para pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya sebagai pemilih telah dirugikan dan pada akhirnya mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

2.2.3 Hak Konstitusional

Indonesia merupakan negara hukum yang bertumpu pada konstitusi yang pada dasarnya memiliki korelasi yang sangat jelas dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara demokratis. Dalam setiap demokrasi, ketertiban rakyat dalam proses dan keberlangsungan suatu negara adalah sebuah esensi dari teori tersebut.

Perkembangan ketatanegaraan modern mengenal hak dasar yang dituangkan sebagai hak konstitusional. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hal ini merupakan perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara negara dalam hubungan negara dengan warga negara. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat :

⁶¹ Titik TriWulan Tutik, 2010, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal. 331.

- 1) Elemen kelembagaan (elemen institusional);
- 2) Elemen kaidah hukum (elemen instrumental); dan
- 3) Elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan *cultural*).

Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup :

- a) Kegiatan pembuatan hukum (*law making*);
- b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*); dan
- c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).

Biasanya kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman.⁶²

Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.⁶³

⁶² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, hal. 306.

⁶³ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 111.

The Rule of Law adalah adanya peran peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk memberikan putusan terhadap segala kasus hukum yang terjadi dalam suatu negara.⁶⁴ Pada prinsipnya Indonesia harus menyelesaikan segala persoalan hukum melalui proses hukum, termasuk penegakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Anis Ibrahim, komunitas hukum Indonesia yang diharapkan mampu memposisikan diri sebagai pencerah justru masih lamban dalam menangkap dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang begitu kompleks, hal tersebut berimplikasi terhadap lambannya penegakkan hukum.⁶⁵ Para penegak hukum tidak bisa secara penuh dipersalahkan dalam keterpurukan hukum yang di alami bangsa Indonesia, karena keterpurukan hukum saat ini sebagai akibat dari tidak optimalnya berbagai komponen dalam sistem hukum (*legal structure, legal substance, legal culture*)⁶⁶ serta yang terpenting adalah masih rendahnya kesadaran hukum dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.⁶⁷

Hak konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat wajib dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara. Dengan kata lain, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi

⁶⁴ F. J. Stahl dan A.V. Dicey, 1965, ditinjau dari International Comission of Jurist, Mengutip The Dynamic Aspects of The Rule of Law in The Modern Age, International Comission of Jurist, hal. 39-50.

⁶⁵ Anis Ibrahim, 2007, Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga, In-TRANS, Malang, hal. 32.

⁶⁶ Legal structure berarti kerangka, bentuk permanen, lembaga institusionalnya. Struktur hukum berarti lembaga peradilan, hakim, termasuk orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. legal substance adalah peraturan-peraturan yang tersusun dan ketentuan yang mengatur bagaimana peran dan perilaku institusi. legal culture berarti elemen sikap dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

⁶⁷ Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, hal. 15-19.

sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Untuk melindungi hak konstitusional, berarti harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga si pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya bilamana terjadi pelanggaran.

Sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi :

”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Kemudian Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 dan pada ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi dapat diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dimana kedaulatannya berada ditangan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dari pernyataan diatas jelas bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi yang tidak dapat dibantah. Kata “kerakyatan” dan “kedaulatan adalah di tangan rakyat” itulah yang menunjukkan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat (warga negara).⁶⁸ Sedangkan karakteristik dari hak konstitusional dapat dijelaskan sebagai berikut :⁶⁹

- a. Pertama, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin

⁶⁸ Mahfud MD, Op.Cit., hal. 116.

⁶⁹ I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) : Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Sinar Grafika, Jakarta, hal. 136.

oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental;

- b. Kedua, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara-legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu;
- c. Ketiga, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud;
- d. Keempat, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain;
- e. Kelima, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Di dalam hukum, setiap warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya. Jadi, maksud dari memiliki kesamaan dan kedudukan yaitu, di hadapan hukum setiap warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya tidak ada yang dapat membedakannya sehingga pada umumnya semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban warga negara tersebut tercantum dalam

Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain :

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Hak berpendapat, tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang”.
3. Hak kemerdekaan memeluk agama, tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :
 - a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
4. Hak membela negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
5. Hak ikut serta dalam pertahanan negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara”.
6. Hak untuk mendapatkan pendidikan, tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi :
 - a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
7. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, tercantum dalam Pasal 32 UUD 1945.
8. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) sampai (5) UUD 1945.
9. Hak mendapatkan jaminan sosial, yang tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945 berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

2.2.4 Hak Politik

Konstitusi negara Indonesia mengatur beberapa hak asasi pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke dua. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak ini meliputi didalamnya hak politik, yang dibagi ke dalam dua hak yaitu hak memilih dan hak dipilih. Hak politik didalam dunia internasional terdapat dalam resolusi 2200A (XXI) MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Indonesia telah meratifikasinya melalui undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hak politik, adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada

setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara.⁷⁰

Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata politik adalah hal-hal yang berkenaan dengan tata negara; urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan negara. Sedangkan secara umum politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis. Hak politik sangat terkait dengan keikutsertaan dengan pemilihan umum, baik sebagai yang dipilih maupun yang memilih yang merupakan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.⁷¹ Selain itu hak politik dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi. Hak politik merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi merupakan hak dimana seseorang menggunakan hak politiknya

⁷⁰ Ansori. (2016). "Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, Th. 1, Nomor 1, hal. 8.

⁷¹ Fuad Fachruddin, 2006. Agama dan Pendidikan Demokrasi : Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Pustaka Alvabet. Hal. 35-36.

harus secara bebas sebagaimana pasal 23 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana hak ini ada pada negara yang menganut demokrasi. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Hak politik kaitannya sebagai hak turut serta dalam pemerintahan khususnya hak memilih, berhubungan dengan hati nurani, sehingga penggunaan hak memilih harus dijalankan dengan bebas tanpa tekanan dan paksaan. Tidak pelak seperti angkatan bersenjata (militer) hak dipilih dan memilih dibatasi karena sifat komando dalam militer dapat mempengaruhi pelaksanaan hak memilih.⁷² Contoh dari hak memilih yang dapat dicabut mencerminkan hak ini sifatnya tidak mutlak atau dapat dikesampingkan. Pengecualian tidak memberikan hak ini kepada subjek atau kelompok tertentu adalah kewenangan negara. Kewenangan ini harus dijamin dalam hukum nasional dan berhubungan dengan hak politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dapat dimuat dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan.⁷³

Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM khusus Pasal 43. Menurut

⁷² Op.cit. Rhona K.M. Smith, at, al 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, hal. 268.

⁷³ *Ibid.* hal. 51.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa : “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Setiap warga negara mempunyai hak politik masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak politik diberikan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut disebutkan antara lain dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi, Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.

2.3 Tinjauan Teoritis tentang Pemilihan Umum

2.3.1 Pemilihan Umum (Pemilu)

Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Jika merujuk pada sejarah-sejarah negara

besar yang berjaya dengan konsep demokrasi serta pendahulu bangsa yang menggagas sistem pemerintahan, maka sistem pemerintahan demokrasi ini diyakini telah sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang toleran. Konsep pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Adapun salah satu syarat pokok atau asas penyelenggaraan pemerintahan demokrasi di Indonesia adalah menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum atau pemilu adalah bentuk nyata dari konsep negara demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi, termasuk Indonesia mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁷⁴ Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung,

⁷⁴ Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", Jurnal Warta, Edisi : 61, Juli 2019, hal. 48.

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁷⁵ Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilihan Umum merupakan suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.⁷⁶

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”. Sementara itu, menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaran yang telah ditentukan.

⁷⁵ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hal. 3.

⁷⁶ M. Masan dan Rachmat, Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hal. 32.

Berdasarkan pandangan tersebut, jelas bahwa pemilu merupakan bagian dalam mewujudkan atau menyalurkan kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, pemilu diharapkan benar-benar dapat diselenggarakan dengan baik tanpa dinodai oleh perilaku oknum tertentu sekaligus masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan untuk menentukan dan memilih wakil-wakilnya sesuai dengan hati nurani.⁷⁷ Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- a. Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara
- b. Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
- c. Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- d. Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat 23 suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- e. Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁷ Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", Jurnal Warta, Edisi : 61, Juli 2019, hal. 48.

- f. Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Tujuan diadakannya Pemilu adalah sebagai wadah untuk melakukan pemilihan terhadap wakil rakyat untuk membentuk suatu roda pemerintahan yang berjalan secara demokratis, dukungan yang kuat dari rakyat sebagai perwujudan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, serta lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pribadi sehingga dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita Negara. Hal ini dikarenakan Pemilu adalah sarana dari penyaluran hak-hak asasi dari Warga Negara yang begitu *principal*.⁷⁸ Tujuan Penyelenggaraan Pemilu Menurut Ramlan Surbakti dalam Khairul Fahmi, tujuan pelaksanaan pemilihan umum adalah Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*). Kedua, merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjaga. Ketiga, merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat yaitu :

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, 2012, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press: Jakarta, hal. 416.

secara tertib dan damai;

- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

2.3.2 Pemilihan Umum Presiden (Pilpres)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 3 ayat (1) yaitu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (1) : “Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai Negara Republik, maka kekuasaan pemerintah di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden. Hal ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 4 Ayat (1), dimana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), mekanisme pemilihan Presiden sebagai pejabat eksekutif diatur secara lebih rinci dalam Pasal 6A UUD 1945, sedangkan Indonesia mengatur perihal pelaksanaan pemilu dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Berangkat dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai sistem pemilihan Presiden di Indonesia.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 42 tahun 2008 mempersyaratkan pengajuan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik

harus mendapatkan 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional. Pemilihannya mempersyaratkan mendapatkan 50 persen suara lebih yang tersebar di 1/3 wilayah propinsi, kalau tidak tercapai dilakukan Pemilu ulang dengan menggunakan syarat suara terbanyak yang akan dilantik. Persyaratan tersebut telah memenuhi kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu, kualifikasi lainnya juga dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara umum kualifikasi sistem presidensiil adalah :⁷⁹

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung.
2. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
3. Menteri negara bertanggungjawab kepada Presiden.
4. Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen.

Secara demokratis pemilihan langsung menurut Mahfud M.D :⁸⁰

1. Membuka pintu tampilnya Presiden dan Wakil Presiden sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri.
2. Perlunya Pemihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.

Sistem presidensiil menganut pemegang kekuasaan adalah Presiden yang terpisah dengan kelembagaan Parlemen. Pemisahan itu diperkuat dengan legitimasi politik yang sama antara Presiden dengan Parlemen, yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat pemilih.⁸¹ Dengan demikian dalam jabatan Presiden terdapat unsur perwakilan

⁷⁹ Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*, UU Press, Yogyakarta, 2004, hal. 107.

⁸⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010, hal. 94.

⁸¹ Janedri M Goffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012, hal. 121.

rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia telah memenuhi sistem presidensiil melalui Pemilihan Umum, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Presiden dan Wakil Presiden harus mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai karakteristik sendiri dibanding Pemilu lainnya, karena walaupun diusung oleh partai politik ataupun Gabungan partai politik pencalonannya, namun belum tentu seluruh konsituen partai politik mendukungnya, karena dalam Pemilu ini figur dan *track record* calon sangat mempengaruhi. Menurut Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pencalonannya hanya bisa diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik, dengan demikian independent tidak bisa mencalonkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Partai Politik yang dimaksud adalah partai politik yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan lolos sebagai peserta pemilu.⁸²

Persyaratan berikutnya partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% suara nasional. Ketentuan ini dihasilkan pada Pemilu legislatif yang pelaksanaannya sebelum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, biasa disebut sebagai *president threshold*. Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden calon harus mendapatkan 50% lebih suara nasional dan tersebar 1/3 provinsi di Indonesia. Apabila belum mencapai batas suara itu, maka dua suara terbanyak dilakukan pemilihan ulang dan suara terbanyak akan

⁸² Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali, Jakarta, 2010, hal. 137.

memenangi Pemilu tersebut. Angka tersebut tidak mudah mendapatkannya, oleh sebab itu pemilu ulang bisa saja terjadi pada dua kontestan dengan suara tertinggi. Ketentuan diatas menafsirkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden setidaknya didukung 50% lebih rakyat pemilih.

2.3.3 Pemilihan Umum Legislatif (Pileg)

Hakekatnya Pemilu legislatif adalah untuk memilih anggota DPR dan DPRD sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta anggota DPD sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi rakyat, membuat undang-undang dan merumuskan anggaran pendapatan dan belanja negara (Undang-Undang nomor 10 tahun 2008). Untuk memudahkan rakyat dalam menentukan pilihannya, partai politik harus mempunyai tanda gambar partai politik dan nama calon anggota lembaga perwakilan. Demikian halnya dengan DPD keberadaannya ditandai dengan pasphoto dan nama calon yang bersangkutan.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada

tahun 1999, 2004, 2009 dan yang keempat akan terjadi pada tahun ini dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kota.

Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka. Nantinya tiap pemilih di pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada. Cara memilihnya adalah dengan mencoblos satu lubang pada gambar calon anggota legislatif yang dipilih atau di gambar partai politik yang anda pilih.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai 132 anggota, 132 anggota tersebut merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sistem memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah memakai sistem *Single Non Transferable Vote*. Saat pemilu legislatif pemilih akan diberi satu surat yang berisi semua calon independent yang telah mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Cara memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya 4 nama kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dipilih di 33 provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 35-100 anggota, jumlah anggota disesuaikan dengan berapa banyak penduduk yang ada di provinsi tersebut. Tentunya

dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam pemilu legislatif kalian harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia. Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.